



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: KAMIS, 16 MEI 2019
Waktu	: Pukul 19.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Revisi BPIH 1440 H/2019 M.
Ketua Rapat	: DR. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 25 dari 49 Anggota Komisi VIII DPR RI 2. Menteri Agama 3. Kepala BPKH

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul **19.00** WIB dan dinyatakan tertutup.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum dengan didampingi Wakil Ketua Komisi VIII TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si, Wakil Ketua Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M. Sc dan H. Marwan Dasopang, M.Si, dan H. Iskan Qolba Lubis, M.A. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dengan agenda “**Revisi Pembiayaan *Indirect Cost* BPIH Penambahan Kuota Jemaah Haji Tahun 1440 H/2019 M**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi upaya dan komitmen Kementerian Agama RI dalam melaksanakan keputusan tentang penyelenggaraan ibadah haji untuk kuota awal dan kuota tambahan.
2. Komisi VIII DPR RI menyetujui beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Adanya rasionalisasi komponen *Indirect Cost* BPIH Penambahan Kuota 10.000 jemaah sebesar Rp33.743.226.899,- dari semula sebesar Rp353.729.060.559,- menjadi sebesar Rp319.985.833.660,-.
 - b. Kekurangan anggaran untuk tambahan kuota sebesar Rp149.985.833.660 (kekurangan pasca rasionalisasi) yang semula akan dibiayai dari APBN, dialihkan pembiayaannya menjadi beban nilai manfaat keuangan haji dari BPKH sebesar Rp100.000.000.000,- dan sisanya dari realokasi anggaran layanan akomodasi di Makkah dan peningkatan layanan transportasi antar-kota sebesar Rp49.985.833.660. Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI mendesak BPKH untuk segera menyediakan anggaran sebesar Rp100.000.000.000 tersebut.
 - c. Realokasi dana kemaslahatan sebesar Rp120.000.000.000,- yang semula akan digunakan untuk manasik di KUA dialihkan penggunaannya untuk membiayai sebagian biaya akomodasi jemaah di Makkah.
 - d. Penggunaan anggaran untuk manasik haji di KUA dapat segera dilakukan mengingat waktu yang tersedia untuk penyelenggaraan manasik sudah sangat terbatas.
3. Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Agama RI untuk menjaga kualitas pelayanan, meskipun dilakukan rasionalisasi terhadap beberapa komponen anggaran.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 20.00 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. H.M. Ali Taher, SH, M.Hum.